

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung cukup terkenal dengan kecantikan perempuan yang disebut juga “mojang”. Keberadaan perempuan di Kota Bandung memiliki peran yang cukup beragam sebagaimana secara kodrati perempuan memiliki tugas dan fungsi sebagai manusia lemah lembut dan mempunyai daya tarik tersendiri (Kartono, 1992, hlm. 5) yang secara umum memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan sebagian memilih peran publik di antaranya guru, dokter, apoteker, pramugari, pramuniaga, pemetik teh, pengrajin kain, dan berbagai lowongan pekerjaan tersedia untuk perempuan. Perempuan memiliki akses yang luas untuk berkontribusi di dunia pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Segala peran publik yang ada di dunia ini, tentu dapat dilakukan oleh seorang perempuan sesuai dengan tuntutan dan perannya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peran perempuan begitu berpengaruh bagi kemajuan suatu bangsa (Ahdiah, 2013, hlm. 1085).

Peran publik menuntut perempuan harus berdikari, karena salah satu faktor kesulitan ekonomi, keadaan moneter yang terjadi dan terus berlangsung dalam sebuah keluarga mengharuskan seorang perempuan ikut serta dalam memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Salah satu cara yang dilakukan oleh perempuan adalah dengan melakukan pekerjaan di luar rumah. Dengan begitu, seorang perempuan mengemban peran sebagai istri, ibu dan pekerja sehingga tanggung jawab yang dipikul begitu besar karena harus mampu mendidik anak, mempertahankan keutuhan rumah tangga dan bersikap profesional terhadap pekerjaannya.

Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, dapat menghasilkan sebuah dampak positif dan negatif bagi kehidupan perempuan karena memikul suatu tanggung jawab sehingga perempuan harus mampu menyeimbangkan peran tersebut. Dampak positif yaitu dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan membantu suami dalam mencari rezeki untuk keluarga. Di sisi lain, terdapat dampak negatif yaitu suatu saat akan adanya persaingan antara

suami dan istri, hal ini menimbulkan perpecahan karena suami merasa harga dirinya lebih rendah dari istri dan perhatian istri terhadap anak berkurang karena kesibukkan perempuan dalam pekerjaannya.

Pada umumnya perempuan mengambil keputusan untuk bekerja dan berperan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut cukup untuk memenuhi keinginan perempuan dalam pencapaian kebutuhan hidupnya seperti membantu ekonomi keluarga, mendidik di lingkungan sekolah, membantu masyarakat yang kesulitan informasi mengenai teknologi, dan berbagai peran yang bermanfaat bagi perempuan dan masyarakat. Namun pada kenyataannya, terdapat perempuan yang memutuskan menjadi WTS atau dikenal luas dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dewasa ini, WTS cukup meresahkan masyarakat Kota Bandung karena tindakan ini dianggap menyimpang sehingga perlu diamankan oleh aparat yang berwenang untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat. WTS dianggap sebagai musuh masyarakat karena pilihannya itu begitu buruk dan hina dengan memilih melacurkan diri di tengah masyarakat. Biasanya, WTS disebut juga sebagai sundal, sundel yang memiliki arti perempuan yang sangat buruk. Tidak heran WTS disebut demikian, karena dirinya menjual harga diri, tubuh dan keperawanan untuk memuaskan hasrat seseorang yang bukan pasangan halalnya (Harnani, 2015).

Banyaknya WTS yang terjaring di Kota Bandung, menjadikan pemerintah turut serta bertanggung jawab dalam membangun kota tertib dengan melakukan kegiatan untuk mengatasi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). pemerintah membentuk Satpol PP sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat berkontribusi dalam mendukung rencana pemerintah sehingga seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, hambatan dalam menempatkan diri di lingkungan dan gangguan dalam melaksanakan fungsi sosial dapat dibantu oleh pemerintah di antaranya perangkat daerah yaitu Satpol PP, membantu masyarakat PMKS yaitu WTS untuk memenuhi kebutuhan hidup secara memadai baik jasmani dan rohani, bekerja sama dengan TNI, Polri, Pengadilan Hukum dan Dinas Sosial.

Keberadaan WTS di Kota Bandung merupakan salah satu bagian dari praktek prostitusi. Keberadaan prostitusi yang tetap ada sampai saat ini, disebabkan oleh permintaan manusia sejak zaman diciptakan untuk memenuhi hasrat seksualnya sehingga hal itu menjadi penyebab prostitusi masih bertahan eksistensinya (Kartono, 2005). Keberadaan laki-laki yang mampu dan terus membayar perempuan sundal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan imajinasi seksualnya, membuat WTS tetap bertahan. Kebetulan para WTS membutuhkan ekonomi yang lebih untuk pencapaian hidupnya, ada pula laki-laki yang bersedia membayar untuk jasa sewa tubuh. Terlepas dari aturan norma yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat, terdapat pula suatu penyakit masyarakat yang sulit diberantas (Hadi dkk, 2001).

Permasalahan mengenai WTS di Kota Bandung sudah tersebar di beberapa lokasi yang sudah terjaring oleh Satpol PP yaitu beberapa di antaranya Jalan Otto Iskandardinata, Dewi Sartika, Ciateul dan Stasiun Bandung. Alasan menjadi WTS juga pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kegagalan dalam berumah tangga. Selayaknya perempuan yang sudah memiliki kodrat untuk merawat dan menyayangi anaknya, maka WTS berlaku demikian kepada anaknya. Untuk keseharian, WTS dianggap melanggar norma adat dan agama, tetapi pada hasil penelitian Lufirana (2014) WTS memiliki sifat lembut, kasih sayang dan pemahaman agama yang cukup baik guna mendidik anaknya. Sedangkan menurut Jones et al, beragam faktor penyebab perempuan menjadi WTS biasanya mengalami gagal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kisah cinta yang gagal karena dikecewakan oleh pasangan, putus asa dalam mencari pekerjaan karena selalu ditolak sehingga dirinya menganggap tidak berguna lagi lalu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang mendesak maupun hanya untuk kesenangan diri (Christie & Purwandari, 2008).

Sama seperti halnya faktor penyebab perempuan menjadi WTS, maka di Kota Bandung berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Bandung, latar belakang WTS yaitu timbulnya kebutuhan ekonomi yang begitu mendesak namun untuk mencari pekerjaan sangat susah karena kemampuan dan pendidikan yang dimiliki rendah, kemudian merasa sakit hati karena telah diselingkuhi, diperkosa dan ditipu. Dengan beberapa faktor yang muncul itu, WTS mencari

jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah dan banyak, yang ditawarkan oleh pihak ketiga untuk menjadi WTS sebagai solusinya

WTS di Kota Bandung begitu mengorbankan dirinya untuk masa kini dan masa depan hanya demi mendapatkan uang yang banyak. Pekerjaan sebagai WTS menimbulkan efek kecanduan karena sifat melayani dengan jasa tubuh sudah jadi hal biasa dan dijadikan kesenangan baik bagi pengguna maupun WTS. Hasil jasa tubuh dan pelayanan seksual itu memang cukup banyak untuk didapat hanya dalam waktu singkat, namun uang hasil “bekerja” itu tidak sepenuhnya menjadi hak WTS karena WTS perlu membaginya kepada mucikari, uang *backing-an*, uang sewa kamar jika tarif tidak termasuk biaya kamar dan yang paling penting uang perawatan diri yang harganya cukup mahal karena hal ini menyangkut alat vital dan masa depan menjadi taruhannya (Harnani & destrianti, 2017, hlm. 303).

Satpol PP di Kota Bandung memiliki tugas untuk mewujudkan kota tertib. Peran yang dilakukan oleh Satpol PP diharapkan mampu untuk menciptakan suatu kota yang aman dari kejahatan dan pelanggaran yang mengganggu ketentraman masyarakat khususnya mengenai WTS. Dengan dibentuknya Satpol PP untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan kondusif umum daerah maka bukan hal yang mustahil jika suatu hari Kota Bandung terus mengalami penurunan jumlah WTS tiap tahunnya. Peran Satpol PP yang begitu penting dalam menciptakan kondisi umum daerah yang tertib sehingga dapat meminimalisir masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang atau negatif.

Dalam hal ini peran Satpol PP turut serta mengelola administrasi publik, di antaranya yaitu sanksi administrasi terhadap perempuan yang dianggap sebagai pelanggaran Perda, yaitu WTS. Maka jika ditinjau berdasarkan aspek *psiko-sosial* seorang WTS yang terdiri dari berubahnya suatu paradigma, berubahnya suatu visi atau landasan berpikir menjadi benar, pergeseran nilai, dan semakin kuatnya komitmen untuk berani berubah menjadi insan yang lebih baik. Aspek-aspek tersebut menjadi kunci terkuat seorang WTS yang menginginkan berubah dan kembali menjadi perempuan yang sesuai dengan norma di masyarakat. Hal mengenai aspek *psiko-sosial* ini berkaitan dengan WTS yang hendak diberantas agar tidak merajalela dan meresahkan masyarakat dengan adanya pembinaan untuk WTS.

Pemberantasan WTS yang begitu banyak di Kota Bandung, dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakkan Perda, dengan unsur terpenting yang berperan di dalamnya yaitu PPNS sebagai penyidik Satpol PP dalam penertiban WTS di Kota Bandung. Sudah ditetapkan dalam sebuah undang-undang bahwa Satpol PP dan penyidik Satpol PP bertugas untuk membantu Kepda dalam menegakkan Perda sehingga terwujudnya kota tertib dan tidak meresahkan masyarakat. Peran Satpol PP dalam penertiban WTS, juga memelihara kestabilan kondisi daerah dengan tertib menegakkan Perda, Perwal dan Kepwal sebagai Perda.

Satpol PP Kota Bandung memiliki seorang Kasat yang berada dibawah tanggung jawab Walikota. Peran Satpol PP dalam penertiban WTS termasuk dalam program kerja yang berurutan yaitu dimulai dari (1) pemeliharaan ketentraman ditengah masyarakat agar tetap tertib dan mencegah perbuatan kriminal (2) dengan pemeliharaan yang stabil, maka penegakkan perlu dilakukan agar tetap tertib (3) penegakkan sesuai dengan Perda dan Perwal (4) Pemberdayaan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tercipta kembali kondisi tertib (4) peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat (6) peningkatan pemberantasan Pekat. Sehingga, melalui serangkaian kegiatan program kerja yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung, menghantarkan salah satunya WTS untuk menjadi masyarakat yang baik, tidak meresahkan dan berguna bagi lingkungan sekitar.

Dengan begitu, terdapat keberhasilan program kerja yaitu dengan ditutupnya lokasi prostitusi, berkurangnya jumlah WTS yang semula pada tahun 2010 berjumlah 511 orang, berkurang pada tahun 2012 menjadi 319 orang. Hasil tersebut dibandingkan dengan tahun 2017 yang menjaring jumlah WTS 112 orang dan berkurang pada tahun 2018 menjadi 63 orang. Angka pengurangan tersebut berasal dari adanya perubahan pada diri WTS yang dilakukan melalui pembinaan, baik yang diberi sanksi administrasi merasa malu, jera maupun yang dibina di Dinas Sosial Sukabumi dan Cirebon. Dengan hasil yang telah dilakukan oleh peran Satpol PP, hal tersulit adalah mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan perubahan sehingga perlu diberikan stimulus agar mau membuka mata dan hati dalam membantu pemerintah untuk memberantas WTS.

Dibalik Satpol PP yang berhasil, pasti ada peran penting yaitu suatu kerja sama yang baik antar sesama anggota, komunikasi dan perlakuan yang baik antara atasan dan bawahan sehingga masing-masing mengemban suatu integritas kerja, kelayakan dalam bekerja dan tanggung jawab dalam menanggung profesinya. Dengan suatu penyakit masyarakat yang merajalela di Kota Bandung khususnya WTS, Satpol PP mampu bekerja sama dan menunjukkan hasil kerja kerasnya yang dibentuk dari suatu kemauan keras dalam membangun perubahan, sehingga Satpol PP memerankan tugasnya dengan tanggung jawab yang terbukti dengan adanya pemimpin yang tangguh dan mampu berkomunikasi serta mengatur para anggotanya agar dapat tercipta program kerja yang berhasil.

Tempat prostitusi yang sudah ditutup di Kota Bandung di antaranya Saritem, yang berdiri tahun 1800-an dan resmi ditutup tahun 2007 sesuai keputusan Walikota Dada Rosyada, Saritem kini berubah menjadi pondok pesantren Dar Al-Taubah. Lalu yang terbaru adalah lokasi prostitusi di Ciateul, yang sudah semakin berkurang karena ditutupnya klub malam di sekitar Ciateul dan beberapa tempat lain yang jumlah WTS-nya semakin berkurang.

Peran Satpol PP dalam mewujudkan Kota Bandung yang bersih dari prostitusi terkait dengan kemajuan dibidang pendidikan, ekonomi, teknologi dan informasi untuk meminimalisir WTS yang memiliki rasa ketidakpuasan atas keberadaannya di lingkungan. Oleh karena itu, peneliti perlu mengkaji secara serius mengenai peran Satpol PP dalam mengurangi WTS di Kota Bandung, sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai gambaran dan informasi bagi pihak lain serta menggugah rasa keikutsertaan masyarakat luas untuk mendukung Satpol PP dalam menciptakan kota tertib. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti hendak memaparkan kajian dan pembahasan yang lebih dalam mengenai peran Satpol PP dalam mengurangi jumlah WTS di Kota Bandung dengan judul: “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Masalah pokok peneliti jabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penertiban WTS di Kota Bandung?
2. apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penertiban WTS di Kota Bandung?
3. bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung?
4. bagaimana gambaran latar belakang perempuan yang menjadi WTS di Kota Bandung?
5. bagaimana pandangan masyarakat terhadap upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini mengenai gambaran Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban WTS di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.
2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.
3. Mendeskripsikan solusi yang ditawarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.
4. Menganalisis latar belakang perempuan yang menjadi WTS di Kota Bandung, untuk mendapat alasan beserta latar belakang kehidupannya.
5. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terkait masalah prostitusi di Kota Bandung khususnya WTS dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk Prodi Sosiologi dalam mengembangkan dan mengaplikasikan suatu teori dengan kehidupan nyata. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemaparan data mengenai peran satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu: Bagi pihak yang berkepentingan, diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran mengenai peran Satpol PP dalam mengurangi jumlah WTS di Kota Bandung.

1. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti terkait dengan peran satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.
2. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi, penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu secara aplikasi teori, dan mengimplementasikan teori sosiologi dengan realita sosial kehidupan masyarakat dalam isu gender, konflik peran dan psikologi perkembangan, dapat dijadikan rujukan bagi pendidik dan materi ajar, hingga penelitian selanjutnya dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk referensi penelitian selanjutnya. Baik dalam kajian pokok bahasan maupun penelitian untuk menyempurnakan hal-hal yang masih belum lengkap dikaji dalam penelitian ini.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

1. Dapat memberikan manfaat informasi bagi dunia pendidikan dengan adanya penelitian mengenai peran satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.
2. Dapat memberikan manfaat kontribusi bagi lembaga berwenang khususnya Satpol PP Kota Bandung.

1.4.4 Manfaat Isu serta Aksi Sosial

1. Dapat memberikan pencerahan terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung dalam kehidupan sosial baik segi teori, maupun konsep dan implementasinya.
2. Memberikan gambaran terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung dan konflik peran yang timbul.
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam mendukung aksi penyuluhan khususnya di Kota Bandung untuk menjaga ketertiban masa kini hingga masa depan, dan data untuk kepentingan yang mendidik seluruh masyarakat agar memiliki pengetahuan luas serta menjadi pertimbangan untuk perempuan dalam memilih peran yang baik sesuai norma.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk mempermudah dalam menemukan suatu data penelitian, maka peneliti menyusun sistematika penulisan:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memaparkan uraian pokok masalah dengan ditampilkannya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian pustaka. Dalam bab ini peneliti menjabarkan tinjauan pustaka yang dilakukan berdasarkan beberapa sumber literature, sumber data *online* ataupun penelitian terdahulu yang digunakan untuk menganalisis dan menguraikan skripsi yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.

BAB III: Metodologi Penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan beberapa pokok yang berkaitan desain penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian yang digunakan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti menganalisis hasil temuan data tentang gambaran umum mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan mengambil keputusan sebagai Wanita

Tuna Susila, Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung, hambatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban WTS di Kota Bandung, solusi yang ditawarkan untuk mengurangi angka pertambahan WTS di Kota Bandung dan pandangan masyarakat mengenai peran Satpol PP dalam penertiban WTS.

BAB V: Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini peneliti memberikan simpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.